DAFTAR PUSTAKA

Andriani. 2007. *Dasar-dasar Perpajakan.* Penerbit Pustaka Universitas Terbuka. Jakarta.

Bungin, B. 2012. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Predana Media Grup. Jakarta.

Destriyatna, G., Sudjana, N., dan Dwiatmanto. 2014. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Dalam Mengoptimalisasikan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Perpajakan*. Vol 3(1):1-9.

Direktorat Jenderal Pajak. 2012. *http://www.pajak.go.id/content/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak*. 12 Oktober 2016 (08:00).

Erwis, N. 2012. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Skripsi*. Universitas Hassanudin. Makassar.

Jati, G. P. 2015. Ditjen Pajak Baru Berhasil Tagih 9,97 Persen Tunggakan Pajak. *http:/www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150521080704-78-54699/ditjen-pajakbaru-berhasil-tagih-997-persen-tunggakan-pajak*. 15 Oktober 2016. (15:40).

Kurniawan, A. 2011. *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Kurniawati, S. 2016. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Piutang Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.

Madjid, O dan Lintje Kalangi. 2015 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pratama Bitung. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 3(4): 478-487

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Andi. Yogyakarta.

_____. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Andi. Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 *Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.* 20

Desember 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 *Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. 20 Desember 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249. Jakarta

Purwono, H. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak.* Erlangga. Jakarta.

Putri, A. 2008. Penyanderaan *(Gijzeling)* Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Suatu Tinjauan Pelaksanaan Penyanderaan pada Periode 2003 Sampai Dengan 2005). *Skripsi*. Universitas Indonesia. Jakarta.

Resmi, S. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 7 Buku 1.* Salemba Empat. Jakarta.

Siagian. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.

Sulityaningsih, E. 2009. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surakarta. Skripsi. Fakulta Ekonomi Sebelas Maret. Surakarta

Tarogan, H. 2011. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam Rangka Mencairkan Piutang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.

_____ Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 *Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. 2 Agustus 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Jakarta.

Veronica, K., Siti, K., dan Icha Fajriana. 2015. Analisis Penyanderaan Pajak (*Gijzeling)* Dalam Upaya Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada KPP Madya Palembang). *Jurnal Jurusan Akuntansi*.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.